

# **PEMBINAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP INDUSTRI KECIL MENENGAH YANG ADA DI KOTA PRABUMULIH**

**Dewi Puspa Eva Oska Marlia**  
**Nim: 21320068**

## **ABSTRAK**

Dewi Puspa Eva Oska Marlia. Pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Industri Kecil Menengah yang ada di Kota Prabumulih. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Industri Kecil Menengah yang ada di Kota Prabumulih. Adapun metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif dengan teknik penumpukan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Prabumulih telah memberikan perhatian yang serius terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh IKM. Melalui program pelatihan yang komprehensif dan pengawasan mutu yang ketat, dinas ini telah menjadi mitra penting dalam membantu pelaku IKM mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Namun, tetap penting untuk terus memperbaiki dan mengembangkan inisiatif ini untuk menghadapi perubahan yang terus berlangsung dalam lingkungan bisnis dan pasar. Industri Kecil Menengah di Kota Prabumulih menghadapi beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat dalam perkembangan mereka. Kelangkaan bahan baku, kesulitan dalam penjualan, dan keterbatasan modal kerja serta investasi, semuanya memiliki dampak yang signifikan terhadap operasional dan pertumbuhan IKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu mengambil langkah-langkah konkrit untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, termasuk melalui pelatihan, bantuan dalam pengembangan pasar, serta fasilitasi akses modal dan sertifikasi yang diperlukan.

**Kata Kunci: Pembinaan, Industri Kecil Menengah**

## **PENDAHULUAN**

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) memainkan peran krusial dalam mendukung perekonomian Indonesia, seperti yang terungkap saat menghadapi krisis ekonomi tahun 1997/1998. Pada masa itu, perusahaan-perusahaan besar yang

diharapkan dapat bertahan justru banyak yang mengalami kegagalan. Sebaliknya, UMKM, sebagai bagian dari ekonomi lokal dengan skala kecil, sumber daya lokal, dan proses produksi sederhana yang menjual produk secara lokal, mampu bertahan di tengah badai krisis. Situasi ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki

ketahanan yang lebih baik terhadap krisis, mungkin disebabkan oleh fleksibilitas struktur organisasi dan tenaga kerja UMKM dalam menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, (Sahahudin, 2017).

Data statistik dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia pada tahun 2015 mencerminkan bahwa jumlah pengusaha besar hanya menyumbang 0,01 persen dari total unit usaha yang ada. Sebaliknya, 99,99 persen lainnya didominasi oleh UMKM, dengan rincian 98,77 persen usaha mikro, 1,13 persen usaha kecil, dan 0,09 persen usaha menengah. UMKM, sebagai sektor yang mendominasi struktur usaha masyarakat, memiliki kapasitas untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja yang merata di seluruh pelosok nusantara. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah dapat memberikan prioritas dalam pembangunan sektor UMKM sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian nasional. (Yuliani, 2021)

Pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan isu penting dalam konteks pengembangan ekonomi lokal di Kota Prabumulih. Kota ini, seperti banyak daerah lain di Indonesia, memiliki sejumlah Industri Kecil Menengah yang berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian lokal dan penyerapan tenaga kerja. Namun, meskipun

potensi yang dimilikinya, masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang perlu diatasi dalam rangka mendukung pertumbuhan dan daya saing IKM di Kota Prabumulih.

Industri Kecil dan Menengah (IKM) memainkan peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia. Kehadiran IKM menjadi krusial karena mampu menciptakan lapangan kerja, menjadikannya sebagai penyumbang pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Selain itu, IKM juga memiliki dampak yang sangat penting dalam perekonomian daerah, memberikan dorongan pada pertumbuhan sektor ekspor nonmigas, dan berperan sebagai industri pendukung yang memproduksi komponen dan suku cadang untuk perusahaan besar. Kemampuan IKM dalam memberikan lapangan kerja tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga tetapi juga berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran di tingkat nasional. Selain itu, kontribusi IKM terhadap pertumbuhan ekspor sektor nonmigas sangat penting untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. Secara keseluruhan, IKM bukan hanya menjadi pilar utama dalam menciptakan lapangan kerja dan pendapatan, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara keseluruhan. . (Lincoln, 1991)

Di era desentralisasi, pemerintah daerah berupaya mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah

mereka. Peningkatan fokus pada pengembangan IKM di daerah ini sangat terkait dengan implementasi otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001. Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengelola dirinya sendiri. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengatur pemanfaatan sumber daya berdasarkan potensi lokal yang dimiliki, termasuk dalam hal mengatur pengembangan IKM di daerah tersebut.

IKM di daerah menjadi penting karena berakar pada kegiatan ekonomi rakyat kecil. Oleh karena itu, IKM menjadi salah satu pondasi utama dalam perekonomian nasional. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pengembangan IKM. Dengan mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan IKM, diharapkan pemerintah daerah dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan daerah mereka. <https://kemenperin.go.id/artikel/22824/Kemenperin-Dukung-Pengembangan-IKM-Berbasis-SDM-Muda-di-Surakarta>

Melalui pembinaan yang efektif, peningkatan dukungan, penyediaan pelatihan yang relevan, penyederhanaan regulasi, dan berbagai upaya lainnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Prabumulih dapat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Industri Kecil Menengah, yang pada gilirannya

akan berdampak positif pada ekonomi dan masyarakat setempat.

Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan / atau modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar, dan kesulitan dalam pemasaran.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Industri Kecil Menengah yang ada di Kota Prabumulih”**

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Pembinaan

Menurut Mitha Thoha, pembinaan diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang bertujuan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Dalam konteks ini, pembinaan menunjukkan adanya perkembangan, peningkatan pertumbuhan, evolusi, atau peningkatan atas berbagai kemungkinan. Definisi pembinaan ini mencakup dua unsur utama, yaitu kemungkinan pembinaan dalam bentuk tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, serta kemampuan pembinaan untuk menciptakan perbaikan atas sesuatu, sebagaimana dikemukakan oleh Pamudji, S (1985).

Menurut Poerwadarmita, pembinaan dapat dijelaskan sebagai

usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai hasil yang lebih baik. Secara umum, pembinaan dianggap sebagai suatu upaya untuk merencanakan perbaikan dalam pola kehidupan. Setiap individu memiliki tujuan hidupnya sendiri dan berkeinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Jika tujuan hidup tidak tercapai, manusia akan berupaya untuk mengatur ulang pola kehidupannya sesuai dengan Poerwadarmita (dalam bukhariestyle.blogspot.com: 2012).

Menurut perspektif psikologi, pembinaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan agar sesuai dengan yang seharusnya. Dalam konteks manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan tujuan agar kegiatan atau program yang sedang berlangsung selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari yang telah direncanakan.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberdayaan (empowerment) memiliki hubungan erat dengan konsep kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan individu untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan, terlepas dari keinginan dan minat mereka sendiri.

Asal kata "pembinaan" berasal dari kata "bina". Dalam arti luas, pembinaan adalah suatu proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha, tindakan, atau

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Dalam konteks pelaksanaan konsep pembinaan, penting untuk didasarkan pada hal yang bersifat efektif dan pragmatis, artinya mampu memberikan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi dan didasarkan pada fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan sehingga dapat diterapkan dalam praktik.

Pembinaan, menurut Masdar Helmi (1997), mencakup segala usaha, ikhtiar, dan kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidakcapaian hasil yang diharapkan dalam pembinaan dapat berdampak signifikan terhadap kondisi seseorang, baik dari segi psikis maupun mental.

Dalam konteks ini, peran pembinaan menjadi sangat penting untuk menyegarkan kondisi psikis dan mental seseorang, mencegah terjadinya depresi, dan secara keseluruhan membantu agar rencana yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pembinaan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, terutama dalam Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62, dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta untuk mencapai pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

### **Pengertian Usaha Kecil Menengah**

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah istilah yang merujuk pada jenis usaha kecil yang memiliki

kekayaan bersih maksimal sebesar Rp 500.000.000,00, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Definisi ini diatur oleh Keputusan Presiden RI nomor 20 tahun 2008. Menurut keputusan tersebut, Usaha Kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari Usaha Menengah atau Usaha Besar.

Kriteria untuk dianggap sebagai Usaha Kecil, sebagaimana tertera dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi syarat kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (limaratus juta rupiah), tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, Usaha Kecil juga memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua setengah miliar rupiah) per tahun. Usaha Kecil ini juga dapat menerima kredit dari bank dengan batasan maksimal mulai dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ciri-ciri Usaha Kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. **Jenis Barang/Komoditi Tetap:** Usaha Kecil umumnya bergerak dalam jenis barang atau komoditi yang sudah tetap dan tidak mudah berubah.
- b. **Lokasi/Tempat Usaha Menetap:** Tempat usaha Usaha Kecil cenderung sudah menetap dan tidak sering berpindah-pindah.

- c. **Administrasi Keuangan Sederhana:** Meskipun masih sederhana, Usaha Kecil pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, memisahkan keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga, dan membuat neraca usaha.
- d. **Izin Usaha dan Legalitas Lainnya:** Usaha Kecil sudah memiliki izin usaha dan memenuhi persyaratan legalitas, termasuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e. **Pengalaman Pengusaha:** Sumberdaya manusia yang terlibat dalam Usaha Kecil memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- f. **Akses ke Perbankan:** Sebagian Usaha Kecil sudah memiliki akses ke perbankan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha.
- g. **Keterbatasan Manajemen Usaha:** Sebagian besar Usaha Kecil belum mampu membuat manajemen usaha dengan baik, seperti business planning.

Selain itu, peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan diatur dan dikelola oleh dua departemen, yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Koperasi dan UKM. Departemen-departemen ini memiliki peran dalam mendukung dan mengembangkan UKM sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional.

## **Teori Pembinaan Yang Digunakan**

Menurut Hidayat mendefinisikan pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan pembinaan yang diharapkan meliputi :

1. Memberi pengarahan. Suatu bentuk kinerja organisasi yang terarah dalam pencapaian tujuan melalui bentuk-bentuk pengarahan dengan maksimal sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana.
2. Memberi bimbingan. Penetapan cara yang telah ditetapkan suatu organisasi dalam mendidik kemampuan berpikir dan pelaksana penerapan hasil pembinaan yang telah diberikan.
3. Melakukan pengawasan. Melakukan pengawasan adalah pelaksanaan monitoring keberlangsungan suatu pelaksanaan yang terjadi dilapangan sesuai dengan penerapan dengan melihat perkembangan dan hasil dari kinerja yang telah dilaksanakan.
4. Memberikan pendidikan dan pelatihan. Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah pembekalan materi secara tertulis maupun lisan serta mengikuti peraktek secara langsung dalam suatu

organisasi dengan tujuan yang akan dilaksanakan.

5. Memberi buku petunjuk. Memberi buku petunjuk adalah penetapan pedoman dalam bentuk materi buku yang menerangkan kecakapan dalam bertindak serta menganalisa bentuk penerapan kegiatan yang berlangsung (Hidayat, 2000: 26)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sebuah metode penelitian yang ditekankan oleh filsafat post-positivisme. Metode kualitatif digunakan untuk mempelajari keadaan benda-benda alam tanpa melibatkan eksperimen. Sugiyono (2012: 13) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi alat utama, dan data dikumpulkan melalui teknologi triangulasi. Analisis data secara keseluruhan bersifat induktif, bersifat kualitatif, dan penelitian ini menekankan pentingnya generalisasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran, memahami, dan menjelaskan kondisi atau fenomena tertentu. Dalam konteks ini, penelitian ini fokus pada pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) yang beroperasi di Kota Prabumulih.

Metode deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci karakteristik, proses, dan interaksi dalam konteks pembinaan industri

kecil dan menengah. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengeksplorasi pemahaman dan pandangan para pemangku kepentingan terkait dengan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pengembangan IKM di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang realitas pembinaan industri kecil dan menengah di Kota Prabumulih, serta dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam upaya mendukung pertumbuhan sektor IKM.

## HASIL PENELITIAN

### **Pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Industri Kecil Menengah yang ada di Kota Prabumulih**

Menurut Hidayat mendefinisikan pembinaan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan, pengarahan, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan pembinaan yang diharapkan meliputi :Memberi pengarahan. Suatu bentuk kinerja organisasi yang terarah dalam pencapaian tujuan melalui bentuk-bentuk pengarahan dengan maksimal sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana.

#### **Memberi pengarahan.**

Suatu bentuk kinerja organisasi yang terarah dalam pencapaian tujuan melalui bentuk-bentuk pengarahan dengan maksimal sehingga pencapaian tujuan dapat terlaksana.

Wawancara dengan Staf Bidang Perindustrian bahwa,

“Kami bekerja erat dengan pelaku IKM melalui interaksi tatap muka dan sesi diskusi. Kami mendengarkan aspirasi dan tantangan yang mereka hadapi. Dari sana, kami memberikan arahan yang spesifik tentang bagaimana mereka dapat memaksimalkan potensi usaha mereka. Kami mengarahkan mereka pada langkah-langkah praktis dalam mengatasi masalah produksi, mengelola keuangan, hingga memasarkan produk mereka dengan lebih baik. Kami secara berkala melakukan follow-up dengan para pelaku IKM yang telah menerima arahan. Kami mengamati perkembangan usaha mereka dan mendengarkan testimoni mereka tentang dampak positif yang diperoleh setelah mengikuti arahan kami. Jika ada hambatan baru yang muncul, kami siap memberikan bimbingan tambahan dan mendukung mereka dalam mengatasi tantangan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Kabid Perindustrian dan staf bidang perindustrian, terlihat bahwa Dinas

Perindustrian telah berhasil memberikan arahan yang spesifik dan relevan kepada pelaku Industri Kecil Menengah di Kota Prabumulih. Langkah-langkah konkret seperti merancang program pelatihan yang disesuaikan, memberikan bimbingan strategis, dan memberikan dukungan finansial melalui akses ke lembaga keuangan telah memberikan dampak positif dalam mengembangkan dan memperkuat IKM di wilayah tersebut.

#### **Memberi bimbingan.**

Penetapan cara yang telah ditetapkan suatu organisasi dalam mendidik kemampuan berpikir dan pelaksana penerapan hasil pembinaan yang telah diberikan.

Kabid Perindustrian mengatakan bahwa,

“Tentu, dengan senang hati. Program pembinaan yang kami jalankan bertujuan untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan unik dari berbagai jenis Industri Kecil Menengah di Kota Prabumulih. Salah satu pendekatan utama kami adalah dengan memberikan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis IKM. Kami melakukan analisis mendalam terhadap setiap jenis IKM yang ada di kota ini. Kami berupaya untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh masing-masing jenis industri, serta peluang yang dapat mereka manfaatkan. Berdasarkan analisis ini, kami menentukan topik pelatihan

yang paling relevan dan bermanfaat bagi pengembangan IKM tersebut. Kami mengadakan pelatihan ini sebanyak 4 kali dalam setahun. Frekuensi ini dipilih agar para pelaku IKM memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan tanpa mengganggu operasional sehari-hari mereka. Setiap pelatihan dilakukan dengan mengakomodasi kebutuhan dan jadwal industri terkait.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernyataan dari Kabid Perindustrian dan Staf Bidang Perindustrian menunjukkan kesadaran yang kuat terhadap kebutuhan unik IKM dan upaya untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kondisi dan tren industri. Dengan pendekatan yang responsif dan beragam, program pembinaan ini memiliki potensi untuk berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan dan kesuksesan Industri Kecil Menengah di Kota Prabumulih.

#### **Melakukan pengawasan.**

Melakukan pengawasan adalah pelaksanaan monitoring keberlangsungan suatu pelaksanaan yang terjadi dilapangan sesuai dengan penerapan dengan melihat perkembangan dan hasil dari kinerja yang telah dilaksanakan.

Menurut Kabid Perindustrian mengatakan bahwa,

“Pengawasan terhadap Industri Kecil Menengah di Kota



Prabumulih dilakukan dengan fokus pada dua aspek utama: menjaga mutu dan kualitas produk serta membantu dalam pengurusan perizinan. Kami percaya bahwa melalui pendekatan yang holistik ini, IKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan mutu dan kualitas produk sangat penting untuk menjaga reputasi dan daya saing IKM. Kami bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pelaku IKM mengenai standar mutu dan proses produksi yang baik. Kami juga melakukan pengawasan rutin dan uji sampel produk untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami memberikan rekomendasi perbaikan kepada IKM bersangkutan. Proses perizinan bisa menjadi hal yang rumit dan memakan waktu bagi pelaku IKM. Kami berperan dalam memudahkan proses ini dengan memberikan panduan lengkap mengenai persyaratan perizinan yang diperlukan untuk beroperasi. Kami juga memiliki layanan konsultasi di mana pelaku IKM dapat berkonsultasi mengenai proses perizinan dan mendapatkan arahan yang jelas. Selain itu, kami bekerja sama dengan instansi terkait untuk

mempercepat proses perizinan dan mengurangi hambatan birokrasi.

Pernyataan dari Kabid Perindustrian dan staf Bidang Perindustrian menggambarkan pendekatan komprehensif dan sinergis dalam pengawasan terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Prabumulih. Beberapa poin kunci yang dapat dianalisis dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah:

1. Pendekatan Holistik untuk Pengawasan IKM: Dinas Perindustrian dan Perdagangan menerapkan pendekatan holistik dalam pengawasan IKM dengan fokus pada mutu dan kualitas produk serta pengurusan perizinan. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa pengembangan berkelanjutan IKM tidak hanya bergantung pada aspek mutu produk, tetapi juga pada pemenuhan aspek hukum dan regulasi.
2. Peran Penting Mutu dan Kualitas Produk: Pernyataan Kabid Perindustrian menegaskan pentingnya mutu dan kualitas produk untuk menjaga reputasi dan daya saing IKM. Pihak berwenang bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada pelaku IKM dalam hal standar mutu dan proses produksi yang baik. Ini mengindikasikan komitmen

untuk meningkatkan mutu produk secara keseluruhan

3. Pengawasan Rutin dan Uji Sampel Produk: Proses pengawasan melibatkan pengawasan rutin dan uji sampel produk guna memastikan bahwa produk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Jika ada perbedaan dengan standar, tindakan perbaikan direkomendasikan. Langkah ini menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar dan spesifikasi yang berlaku.
4. Fasilitasi Proses Perizinan: Faktor birokrasi dan kompleksitas dalam proses perizinan seringkali menjadi hambatan bagi IKM. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berperan dalam memudahkan proses ini dengan memberikan panduan lengkap mengenai persyaratan perizinan. Ini mencerminkan dorongan untuk mempercepat inisiasi dan operasionalisasi IKM.

#### **Memberikan pendidikan dan pelatihan.**

Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah pembekalan materi secara tertulis maupun lisan serta mengikutkan peraktek secara langsung dalam suatu organisasi dengan tujuan yang akan dilaksanakan.

Menurut Staf Pegawai mengatakan bahwa,

Proses pelaksanaan kegiatan pelatihan dimulai dengan perencanaan matang dari tim kami. Kami berkolaborasi dengan instruktur dan narasumber yang ahli di bidangnya. Setiap program pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan jenis usaha IKM. Kami juga memastikan lokasi, materi, dan jadwal pelatihan terorganisir dengan baik. Responnya sangat positif. Pelaku IKM sangat antusias untuk mengikuti pelatihan ini karena mereka melihat nilai tambah yang signifikan dalam pengembangan usaha mereka. Kami mendapatkan banyak umpan balik positif setelah pelatihan selesai, dan banyak pelaku IKM yang melaporkan peningkatan kinerja usaha mereka setelah mengikuti program ini.

Pernyataan dari Kabid Perindustrian, staf pegawai, dan pelaku usaha kecil menengah (IKM) memberikan gambaran yang konsisten tentang manfaat dan efektivitas program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beberapa poin penting yang dapat dianalisis dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah:

1. Kebutuhan Berbasis dan Kolaboratif: Program pelatihan ini secara jelas dirancang berdasarkan pada kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku IKM. Ini

mencerminkan pendekatan berbasis data dan responsif terhadap kebutuhan nyata para peserta pelatihan. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai ahli industri dan lembaga terkait menunjukkan usaha untuk memberikan pandangan yang holistik dan komprehensif dalam merancang kurikulum.

2. Fokus pada Peningkatan Keterampilan Multidimensi: Pernyataan Kabid Perindustrian menunjukkan bahwa program pelatihan ini melibatkan aspek-aspek penting dalam pengembangan IKM, termasuk peningkatan keterampilan produksi, manajemen usaha, pemasaran, dan pemahaman tentang regulasi dan standar mutu. Ini menunjukkan upaya untuk membantu pelaku IKM dalam meningkatkan daya saing mereka melalui pengembangan kompetensi yang beragam.
3. Proses Pendaftaran yang Mudah: Penjelasan tentang cara mendaftar untuk program pelatihan menunjukkan upaya untuk menjadikan proses ini sesederhana mungkin. Opsi pendaftaran online dan melalui kantor Desperindag memberikan fleksibilitas kepada pelaku IKM dalam memilih cara yang paling sesuai dengan preferensi dan aksesibilitas mereka.
4. Manfaat yang Diharapkan: Keberagaman manfaat yang diharapkan dari program

pelatihan ini sangat mencolok. Dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan, hingga pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan standar mutu, serta ekspansi jaringan dan kolaborasi, program ini diharapkan memberikan dampak positif yang sangat luas.

### **Memberi buku petunjuk.**

Memberi buku petunjuk adalah penetapan pedoman dalam bentuk materi buku yang menerangkan kecakapan dalam bertindak serta menagnalisa bentuk penerapan kegiatan yang berlangsung (Hidayat, 2000: 26)

Staf Pegawai mengatakan bahwa,

“Proses penyusunan materi pelatihan dan buku pedoman melibatkan kolaborasi antara tim kami, instruktur, dan narasumber yang ahli di bidangnya. Kami memastikan bahwa materi yang disampaikan mencakup informasi yang relevan dan praktis bagi para pelaku IKM. Buku pedoman juga disusun dengan gaya yang mudah dimengerti dan dilengkapi dengan contoh-contoh nyata yang dapat diterapkan.

Keseluruhan wawancara menunjukkan pendekatan holistik dan terstruktur yang diterapkan oleh Desperindag dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada

Industri Kecil Menengah (IKM). Berbagai aspek dari proses ini, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan manfaat yang diperoleh oleh pelaku IKM, tercermin dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Kabid Perindustrian, staf pegawai, dan pelaku IKM.

1. Relevansi Materi Pelatihan: Pernyataan dari Kabid Perindustrian dan staf pegawai menunjukkan kesadaran yang kuat tentang pentingnya menyampaikan materi yang relevan dengan kebutuhan pelaku IKM. Ini menggarisbawahi pendekatan yang responsif terhadap tantangan dan kebutuhan nyata dalam pengembangan usaha.
2. Variasi Metode Pengajaran: Menggunakan berbagai metode pengajaran, seperti presentasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan demonstrasi praktis, menunjukkan upaya untuk memastikan bahwa peserta pelatihan memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang paling efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing peserta.
3. Dampak Buku Pedoman: Pemberian buku pedoman atau petunjuk sebagai alat referensi memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku IKM. Ini memberikan akses kepada mereka untuk mengingat kembali materi-materi pelatihan dan memberikan panduan praktis saat mereka

menghadapi tantangan dalam operasional sehari-hari.

4. Kolaborasi Tim Ahli: Kolaborasi yang erat dengan instruktur dan narasumber yang ahli menunjukkan komitmen untuk memberikan materi pelatihan yang berkualitas tinggi dan relevan. Ini juga menghadirkan perspektif multidisiplin yang penting dalam membantu para pelaku IKM dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat**

Melalui koordinasi yang efektif, kontribusi dari tenaga ahli, dan semangat yang tinggi dari pelaku IKM, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap Industri Kecil Menengah di Kota Prabumulih menjadi lebih kuat dan berdampak positif.

Menurut Kabid Perindustrian mengatakan bahwa

“Koordinasi yang efektif menjadi tulang punggung dari semua upaya pembinaan. Kami bekerja keras untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan terstruktur antara tim internal kami, pelaku IKM, serta pihak eksternal seperti lembaga terkait dan komunitas industri. Dengan koordinasi yang baik, kami dapat memastikan bahwa sumber daya dan informasi mengalir dengan lancar, mendukung pengembangan berkelanjutan para pelaku IKM. Peran tenaga ahli sangat vital dalam memastikan

kualitas pelatihan yang kami berikan. Kami berkolaborasi dengan para ahli industri yang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aspek bisnis, termasuk produksi, manajemen, pemasaran, dan perizinan. Pengetahuan dan pengalaman mereka membawa wawasan praktis yang sangat berharga bagi pelaku IKM. Mereka membantu mengarahkan para peserta pelatihan dengan solusi yang tepat guna, yang dapat diaplikasikan dalam usaha mereka sehari-hari. Semangat dari pelaku IKM adalah elemen pendorong yang sangat berarti dalam pembinaan. Semangat ini menciptakan lingkungan yang positif dan berkolaborasi. Ketika pelaku IKM datang dengan semangat dan antusiasme, mereka lebih terbuka untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep baru yang diajarkan dalam pelatihan. Semangat ini juga berdampak pada pertukaran pengalaman di antara mereka, memperkaya wawasan dan solusi yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi bisnis.

Koordinasi yang efektif, keterlibatan tenaga ahli dalam memberikan pelatihan, dan semangat dari pelaku industri kecil menengah (IKM) memainkan peran penting sebagai faktor pendukung dalam pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap IKM di Kota Prabumulih.

Mari kita lihat lebih dalam tentang masing-masing faktor ini:

1. Koordinasi yang Efektif: Koordinasi yang baik antara semua pihak terkait, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, lembaga terkait, dan pelaku IKM, menjadi fondasi kuat dalam memberikan pembinaan yang sukses. Koordinasi yang baik memungkinkan informasi dan sumber daya dapat mengalir dengan lancar, memastikan bahwa setiap tahap pembinaan terarah dan sesuai dengan kebutuhan pelaku IKM.
2. Tenaga Ahli dan Narasumber: Keterlibatan tenaga ahli dan narasumber yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman dalam berbagai aspek industri, seperti produksi, manajemen, pemasaran, dan perizinan, adalah kunci untuk menyampaikan pelatihan berkualitas tinggi. Tenaga ahli ini dapat memberikan wawasan mendalam, solusi praktis, dan strategi yang relevan kepada pelaku IKM, membantu mereka dalam mengatasi tantangan dan mengoptimalkan potensi bisnis mereka.
3. Semangat dari Pelaku IKM: Semangat, antusiasme, dan keterbukaan dari pelaku IKM untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan memiliki dampak besar pada keberhasilan program tersebut. Ketika pelaku IKM aktif terlibat dan

bersemangat, mereka lebih mungkin untuk mengambil manfaat maksimal dari pelatihan dan menerapkannya dalam praktik bisnis mereka. Semangat ini juga dapat menciptakan lingkungan yang dinamis dan kolaboratif di antara para pelaku IKM.

Kombinasi dari ketiga faktor tersebut menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembinaan yang berhasil. Koordinasi yang baik mengarah pada penyampaian informasi yang tepat waktu dan sumber daya yang diperlukan. Keterlibatan tenaga ahli dan narasumber memastikan bahwa pelatihan memiliki dampak yang signifikan dan praktis bagi pelaku IKM. Semangat dan antusiasme dari pelaku IKM menjadikan mereka penerima aktif dalam pembinaan ini, yang berkontribusi pada kesuksesan dan pembangunan berkelanjutan dalam industri kecil menengah di Kota Prabumulih.

### **Faktor Penghambat**

Ada beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat yaitu sering terjadi kelangkaan bahan baku, sulit untuk mencari tempat menjual hasil industri kecil menengah, sertifikat halal belum ada, keterbatasan modal kerja dan / atau modal investasi

Wawancara dengan Staf Pegawai mengatakan bahwa,

“Dalam setiap pelatihan yang kami berikan, kami berfokus

pada bagaimana mereka dapat mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien. Kami juga memberikan wawasan tentang cara menjalin kemitraan yang strategis dengan pemasok agar mereka memiliki akses yang lebih baik ke bahan baku. Kami memberikan informasi dan alat yang diperlukan agar mereka dapat menyusun rencana bisnis yang kuat. Kami mengajarkan pengelolaan keuangan yang lebih baik, termasuk bagaimana merencanakan penggunaan modal dengan bijak dan efisien. Ini memberikan peluang bagi pelaku IKM untuk lebih mudah mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan. Kami memberikan pelatihan mengenai pemasaran yang efektif, diferensiasi produk, dan peningkatan kualitas. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat mengembangkan produk yang lebih unik dan bernilai lebih tinggi. Kami juga mendorong mereka untuk menjalin kerjasama, berbagi ide, dan bersama-sama menciptakan keunggulan bersaing.

Menurut kapid Perindustrian menambahkan lagi bahwa,

“sisi lemah dari IKM adalah sebagian masih belum ada sertifikat halal dan sedang diupayakan kedepannya karena hal ini memang sangat penting,

namun saat ini kami belum bisa mewujudkannya, karena masih ada keterbatasan dan kapasitas terbatas, maklum saja namanya juga mengikuti program gratis dari APBD pemerintah daerah akan tetapi insyaAllah nanti akan diupayakan”

Dalam wawancara tersebut, Kabid Perindustrian, dan staf pegawai Bidang, memberikan pandangan yang cukup komprehensif tentang bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Prabumulih. Berikut adalah beberapa analisis dari wawancara tersebut:

1. Respons Terhadap Tantangan Bahan Baku: Tantangan kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku di pasaran seringkali menjadi masalah bagi IKM. Kabid Perindustrian menekankan upaya kerjasama dengan pemasok bahan baku untuk menjaga pasokan stabil, termasuk menjalin kontrak jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan berusaha untuk memberikan solusi konkret bagi pelaku IKM dengan fokus pada akses yang lebih baik terhadap bahan baku.
2. Pemberian Dukungan Modal: Kurangnya modal usaha menjadi hambatan yang signifikan. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memfasilitasi akses modal melalui lembaga

keuangan dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan memberikan gambaran bahwa mereka berusaha untuk mengatasi hambatan ini dengan pendekatan yang holistik, yang mencakup aspek keuangan dan manajemen bisnis.

3. Persaingan yang Sengit: Kabid Perindustrian menyoroti pentingnya strategi pemasaran, diferensiasi produk, dan pengembangan nilai tambah untuk menghadapi persaingan yang ketat. Fokus pada pelatihan dalam hal ini menunjukkan upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kapasitas para pelaku IKM dalam menghadapi tantangan kompetitif.
4. Mencari Tempat Penjualan: Kesulitan dalam mencari tempat untuk menjual produk menjadi faktor yang signifikan. Pameran, event promosi, platform e-commerce, dan pelatihan pemasaran digital yang diberikan sebagai solusi menunjukkan langkah-langkah yang diambil oleh dinas tersebut untuk membantu pelaku IKM dalam memperluas jangkauan pasar mereka.

### **Hasil Penelitian**

Dalam rangka menganalisis tantangan yang dihadapi oleh Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Prabumulih, penelitian ini menemukan beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat bagi perkembangan dan pertumbuhan sektor IKM. Dalam

penyelidikan ini, berbagai sumber data dianalisis, termasuk wawancara dengan pelaku IKM, staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta literatur terkait. Temuan-temuan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh IKM di kota tersebut.

1. Kelangkaan Bahan Baku: Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh IKM di Kota Prabumulih adalah sering terjadinya kelangkaan bahan baku. Kenaikan harga dan kelangkaan bahan baku di pasaran dapat secara langsung mempengaruhi proses produksi dan kualitas produk IKM. Hal ini mengakibatkan keterlambatan produksi dan mungkin mengganggu kesinambungan operasional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya untuk memitigasi masalah ini dengan mendorong kerjasama antara pelaku IKM dan pemasok bahan baku, termasuk menjalin kontrak jangka panjang untuk memastikan pasokan yang stabil.
2. Kesulitan dalam Penjualan: Ketidakmampuan untuk mencari tempat yang cocok untuk menjual produk adalah kendala lain yang dihadapi oleh IKM. Dalam lingkungan yang kompetitif, pelaku IKM sering kali menghadapi kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupaya

untuk mengatasi masalah ini dengan mengadakan pameran, event promosi, dan memberikan pelatihan dalam pemasaran digital. Langkah-langkah ini diambil untuk membantu pelaku IKM dalam memperluas jaringan dan meningkatkan visibilitas produk mereka.

3. Keterbatasan Modal: Keterbatasan modal, baik modal kerja maupun modal investasi, juga merupakan masalah yang signifikan. Pelaku IKM sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses dana yang diperlukan untuk mengembangkan atau menjalankan bisnis mereka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan perlu mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang dapat diakses oleh pelaku IKM, serta memberikan pelatihan tentang manajemen keuangan dan pengembangan rencana bisnis yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar P.S dan Usman. 2008. *Pengantar Statistika*, Jakarta : Bumi Aksara
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta



- Denzin dan Lincoln (ed) (1994), *Hand Book of Qualitative Research*, Sage. Publication
- Hidayat, Rahmat. (2000). "Pembinaan: Usaha Sadar, Terencana, Teratur, dan Terarah." <https://jurnal.dharma.wangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/download/136/131>
- Kemenperin Dukung Pengembangan IKM Berbasis SDM Muda di Surakarta  
<https://kemenperin.go.id/artikel/22824/Kemenperin-Dukung-Pengembangan-IKM-Berbasis-SDM-Muda-di-Surakarta>
- M. Thoha. (1986). *Prilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Masdar, Helmi, *Dakwah Islam Alam Pembangunan*, Semarang: CV. Toha Putra, 1997
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moleong, Lexy. J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslihini (2013), *Pengertian dan Peran Pembinaan*  
<https://www.referensimakalah.com/2013/05/pengertian-dan-peran-pembinaan.html?m=1>
- Pamudji, S., (1985). *Kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Poerwadarminta, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai **Pustaka**, Jakarta
- Salahudin (2017), *Model Manajemen kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Usaha Tepung Tapioka Dalam Jurnal Aristo* DOI: 10.31219/osf.io/7y5tu
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

## KEBIJAKAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengertian Usaha Kecil Menengah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun  
2009 Tentang Pelayanan  
Publik

Keputusan Menteri Keuangan  
No.316/Kmk.016/1994  
Tentang Pedoman Pembinaan  
Usaha Kecil Dan Koperasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) No.  
99 Tahun 1998 Bidang/Jenis  
Usaha Yang Dicadangkan  
Untuk Usaha Kecil Dan  
Bidang/Jenis Usaha Yang  
Terbuka Untuk Usaha  
Menengah Atau Usaha Besar  
Dengan Syarat Kemitraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No.  
20 Tahun 2008 Pembentukan  
Eminent Person Group  
Indonesia

Keputusan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara Nomor. 63  
tahun 2003 tentang Pedoman  
umum penyelenggaraan  
pelayanan publik

Keputusan Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara Nomor 63  
tahun 2004 Tentang Pedoman  
Umum Penyusunan Indeks  
Kepuasan Masyarakat Unit  
Pelayanan Instansi Pemerintah